

KEGIATAN SOSIALISASI KPU KABUPATEN SEMARANG DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020



Oleh :

Iqbal Jazuli

Nim : 40010717060115

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

SEKOLAH VOKASI

D3 HUBUNGAN MASYARAKAT

2020

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap : Iqbal Jazuli
- Nomor Induk Mahasiswa : 40010717060115
- Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 7 Juli 1999
- Jurusan / Program Studi : D III Hubungan Masyarakat
- Alamat : Jl. Raya Srengseng Rt/Rw 03/02, Srengseng, Pagerbarang,
Tegal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :

**KEGIATAN SOSIALISASI KPU KABUPATEN SEMARANG DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 12 Juli 2021

Pembuat Pernyataan

Iqbal Jazuli

NIM.40010717060115

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Kegiatan Sosialisasi Kpu Kabupaten Semarang Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020

Nama Penyusun : Iqbal Jazuli
NIM : 40010717060115
Program Studi : Hubungan Masyarakat
Jurusan : D-III Hubungan Masyarakat
Fakultas : Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program D-III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Dosen Pembimbing :



Primada Qurrota Ayun, S.I.Kom M.A.
NIP. H.7.198810192018072001

Dosen Penguji :



Dr. Adi Nugroho, M.Si
NIP. 196510171993111001

/

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi DIII
Hubungan Masyarakat



Agus Naryoso, S.Sos. M.SI.
NIP.19750831200212100

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan tidak lupa terimakasih kepada Kedua orang tua saya yang telah memberikan nasehat dan semangat kepada saya. Serta teman-teman yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi berjudul “Kegiatan Sosialisasi Kpu Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020”. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi peneliti dan dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kegiatan Sosialisasi Kpu Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Humas KPU dalam Upaya Mensosialisasikan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. Peran humas merupakan kunci suksesnya Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang, upaya tersebut dilakukan lewat kegiatan sosialisasi dan serangkaian upaya lainnya yang akan dijabarkan penulis pada bab pembahasan. Peran-peran humas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang akan penulis uraikan dan jabarkan berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak-pihak terkait.

Pada bab 1 sebagai pendahuluan penulis menuliskan tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok penelitian pada tugas akhir ini, pada bab 2 penulis memberikan gambaran umum tentang obyek penelitian yaitu sejarah dan tahapan-tahapan pemilihan bupati kabupaten Semarang Tahun 2020, pada bab 3 penulis menjabarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan, kemudian pada bab 4 penulis menuliskan interpretasi atau pembahasan yang telah dikaitkan dengan teori yang digunakan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada bab sebelumnya, pada bab 5 penulis memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

ABSTRAK

Judul : Kegiatan Sosialisasi Kpu Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020

Nama : Iqbal Jazuli

NIM : 40010717060104

Program Studi : D III Hubungan Masyarakat

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang salah satunya mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Humas memiliki peran yang sangat penting dalam instansi yaitu untuk menjalankan program yang ada di instansi tersebut. Kurangnya kegiatan sosialisasi membuat masyarakat tidak mengetahui informasi tentang pemilihan bupati kabupaten Semarang. Maka dari itu, KPU berkewajiban untuk mensukseskan kegiatan pemilihan bupati kabupaten Semarang dengan cara melakukan upaya sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas KPU Kabupaten Semarang dalam upaya mensosialisasikan pemilihan bupati kabupaten Semarang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan membuat interview guide.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Humas KPU Kabupaten Semarang telah menjalankan empat peran humas yaitu; sebagai komunikator lewat kegiatan sosialisasi ke sekolah maupun ke masyarakat, menjalin hubungan dengan mengadakan media gathering dan membuka audiensi dengan komunitas Gempur (Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran), sebagai penunjang fungsi manajemen humas KPU kabupaten Semarang melakukan perencanaan lewat rapat koordinasi dan rapat pleno sesuai dengan POAC (planning, organizing, actuating, controlling), dan peran humas membangun citra instansi dengan cara melakukan kegiatan press release serta memberi solusi atas aduan kritik & saran dari masyarakat dengan membuka layanan *Help Desk* di empat kecamatan yaitu (Bawen, Pabelan, Tengeran, dan Bandungan).

Kata Kunci: Peran PR, Sosialisasi, KPU Kabupaten Semarang

ABSTRACT

Title : Semarang Regency KPU Socialization Activities in Increasing Community Participation in the Implementation of the 2020 Semarang Regent and Deputy Regent Elections

Name : Iqbal Jazuli

NIM : 40010717060115

Study Program: D III Public Relations

The KPU is an election organizer, one of which encourages the public to exercise their voting rights. Public relations has a very important role in institutions, namely to carry out existing programs in that agency. Lack of outreach activities made the public not aware of information about the election for the regent of Semarang district. Therefore, the KPU is obliged to make the election activities for the regent of Semarang district succeed by conducting socialization efforts. This study aims to determine the role of public relations of the Semarang Regency KPU in an effort to socialize the election of the Semarang regent in 2020. This research uses descriptive qualitative methods. Collecting data using in-depth interview techniques by making interview guides.

The results of this study indicate that the Public Relations of KPU Semarang Regency has carried out four PR roles, namely; as a communicator through outreach activities to schools and to the community, establish relationships by holding media gatherings and opening audiences with the Gempur community (ungaran worker community movement), as a support for the public relations management function of the Semarang Regency KPU, planning through coordination meetings and plenary meetings in accordance with POAC (planning, organizing, actuating, controlling), and the role of public relations to build the image of the agency by conducting press release activities and providing solutions to complaints & suggestions from the public by opening Help Desk services in four districts, namely (Bawen, Pabelan, Tengaran, and Bandungan) .

Keyword: Role of Public Relations, Socialization, General Election Commission (KPU)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 KERANGKA TEORI	6
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 SEJARAH MASKOT PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020	10
2.2 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020	11
2.3 PASANGAN CALON BUPATI & CAKUPAN DAERAH	12
2.4 TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020	13

BAB III.....	14
METODE PENELITIAN	14
3.1 PENEMUAN MASALAH (FACT FINDING)	15
3.2.PERENCANAAN DAN PEMOGRAMAN (PLANNING DAN PROGRAMMING)	16
3.3 MENKOMUNIKASIKAN DAN PELAKSANAAN (COMMUNICATION -ACTION).....	18
3.4 EVALUASI (EVALATION)	20
BAB IV	22
PEMBAHASAN KEGIATAN SOSIALISASI KPU KABUPATEN SEMARANG.....	22
4.1.3 Aksi dan Komunikasi (Taking Actions and Communication)	26
BAB V PENUTUP	30
5.1 KESIMPULAN.....	30
5.2 SARAN	31
Daftar pustaka.....	32
Lampiran	33
INTERVIEW GUIDE	44
TRANSKRIP WAWANCARA	46
DOKUMENTASI.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah sebuah program Pemerintah sebagai sarana memilih calon pemimpin. PEMILU menjadi salah satu momen yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam 5 tahun, karena pemilihan umum yang kita kenal sebagai PEMILU adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokrasi. Dimana rakyat berhak memilih dan memberi suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan menjadi pemimpin yang baik.

Pemerintah berperan penting pada pelaksanaan pemilihan umum dalam memberi fasilitas yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas dalam melaksanakan pemilihan baik itu presiden maupun pemilihan kepala daerah. Dalam PKPU nomer 8 tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan. Peraturan KPU No. 11 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pemilu diantaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk

memberikan nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pemungutan hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informative, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker dan sebagainya. Untuk melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU berpegang pada Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum. Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka dalam pelaksanaan tugas dan kewenang para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisipan, dan tidak memihak.

Telah dijelaskan pula dalam UU Pemilukada Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 pasal 13 yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. KPU sangat memiliki peran besar sebagai agen sosialisasi kepada masyarakat, dari KPU daerah ini yang lebih mengerti bagaimana seluk beluk daerahnya masing-masing (UU Pemilukada No. 8 tahun 2015).

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. 3 Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta kesadaran politik masyarakat untuk kebaikan suatu negara. Sosialisasi yang diberikan ini juga diharapkan dapat dilakukan dengan gencar serta lebih mendalam pada desa-desa yang kurang pengetahuan politiknya. Pentingnya sosialisasi politik juga harus ditetapkan pada pemilih pemula, seperti melakukan sosialisasi di SMA maupun SMK yang memiliki pemilih-pemilih pemula yang suaranya juga penting untuk menciptakan suatu perubahan. Sosialisasi juga diterima oleh stakeholder terkait seperti partai politik serta pemda. Sebagai daerah yang juga mengikuti pilkada langsung, Kabupaten Semarang mempersiapkan banyak hal untuk menyambut pesta demokrasi ini, antara lain pengamanan oleh aparat keamanan dari POLRI hingga TNI ikut dalam mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2015.

Kabupaten Semarang memiliki jumlah penduduk 989.399, jumlah kecamatan 19 dan jumlah Desa/ Kelurahan 235.

Pada setiap pemilihan jumlah masyarakat yang memilih di Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit, namun daribanyaknya peningkatan itu masih banyak masyarakat yang golput dengan berbagai alasan. Dari data yang ada pada pilkada Kabupaten Semarang tahun 2005, tingkat partisipasi hanya 60,77%. Sedangkan pada pilkada tahun 2010, angka partisipasi masyarakat menjadi 62,41%. Saat itu jumlah 735.418 pemilih yang tercatat dalam DPT maupun DPTb, yang menggunakan hak pilihnya hanya 459.018 suara. Tingkat partisipasi warga Kabupaten Semarang dalam pilkada lalu mencapai 70,08%. Partisipasi pemilih pada pilkada pada tahun 2015 mengalami peningkatan 7,67% dari pilkada tahun sebelumnya. Dari 743.551 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilihan tetap (DPT) maupun DPT Tambahan (DPTb), sebanyak 520.450 pemilih datang

ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Sedangkan partisipasi pemilih pada pilkada pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari pilkada sebelumnya. Dari 608.997 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilihan tetap (DPT) maupun DPT Tambahan (DPTb), sebanyak 575.486 pemilih datang ke TPS Untuk menggunakan hak suaranya.

Dengan dilakukan sosialisasi, KPU berharap agar masyarakat yang golput dapat berkurang serta masyarakat yang kurang paham dengan pilkada dijadikan lebih paham dengan pilkada dan masyarakat tidak hanya diajak memilih, namun dapat menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih berdasarkan hati nurani.

Peneliti mengambil judul ini karena masih banyaknya masyarakat golput walaupun setiap tahun jumlah partisipasi masyarakat meningkat, namun jumlah golput dengan masalah yang sama harus ditindak lanjuti dengan cara sosialisasi yang gencar dan tentunya sosialisasi tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal ini, maka di pandang untuk meneliti bagaimana sosialisasi dari KPU pada pilkada Langsung tahun 2020 dengan judul “ **kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Kegiatan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam rangka sosialisasi Pilkada langsung tahun 2020
2. Apa kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada langsung tahun 2020

3. Bagaimanakah efektivitas KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam rangka sosialisasi pilkada langsung tahun 2020
2. Mengetahui hambatan yang dialami KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada Langsung tahun 2020 di Kabupaten Semarang
3. Mengetahui efektivitas yang dicapai oleh KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada langsung Tahun 2020 di Kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian ilmiah Public Relations (humas) dalam ilmu komunikasi khususnya mengenai peran Humas & Sosialisasi. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian sejenis yang terdahulu, dan memberikan penjelasan baru mengenai pentingnya sebuah sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020 berlangsung.

2. Praktis

Dilihat dari kegunaan praktisnya, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, masyarakat, maupun pekerja di bidang humas khususnya mengenai pelaksanaan

sosialisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam mengevaluasi kegiatan sosialisasi dalam mensukseskan sebuah pemilu.

1.5 KERANGKA TEORI

Didalam suatu instansi pemerintah dibutuhkan seorang praktisi Public Relations atau Humas. Selain sebagai jembatan antara instansi dengan publik, seorang humas juga berperan penting dalam menjalin hubungan baik dengan para stakeholder. Peran humas sangat dibutuhkan oleh instansi. Menurut (Ruslan, 2016:342-343):

Dengan adanya Humas disuatu lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional. Ruang lingkup humas itu sesungguhnya tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi atau menyebarkan informasi tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi yang ditunjukan untuk mempengaruhi opini publik. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasi atau menjelaskan kebijakan dan tindakan-tindakan tertentu serta strategi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban pemerintah.

1. Peran Humas

Cutlip, Center dan Broom (Rachmadi, 1994:32) Humas memiliki peran yaitu:

1. Sebagai communicator, yaitu humas harus menjadi pendengar sekaligus pembicara yang baik bagi keinginan public dan organisasi/perusahaan, sehingga terjalin komunikasi dua arah agar dapat terbina hubungan yang harmonis antar organisasi/perusahaan dengan publiknya.
2. Sebagai image maker, yaitu hal ini merupakan tujuan akhir dari aktivitas suatu program kerja Humas baik dalam publikasi maupun promosi.

3. Sebagai Back-up management, yaitu seorang humas harus bisa jaga nama baik organisasi/perusahaan, sehingga dalam situasi sesulit apapun humas harus bisa menangani segala macam situasi yang dihadapi organisasi/perusahaan.
4. Sebagai conceptor yaitu pembuatan konsep atau ide untuk berbagai kegiatan yang ada di perusahaan guna memelihara dan menciptakan citra perusahaan.
5. Sebagai mediator, menjadi jembatan dalam perusahaan dengan menjalin hubungan baik dengan publik internal maupun publik eksternal.
6. Sebagai creator, menciptakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan untuk materi promosi ataupun materi publikasi.
7. Sebagai problem solver, untuk mengatasi masalah dengan melakukan antisipasi melalui tahapan kerja Humas, baik yang berhubungan dengan antisipasi melalui tahapan kerja Humas, baik yang berhubungan dengan public internal maupun public eksternal.

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pengetahuan dengan suatu tujuan, bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampaikan.

1. Strategi Sosialisasi

(Efendi,2009:32) strategi sosialisasi merupakan panduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi kondisi.

2. Tahapan sosialisasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi, ada beberapa tahapan yang dapat dijadikan acuan oleh praktisi humas dalam melakukan program Public Relations menurut Cutlip&Center yang mengacu pada pendekatan manajeral:

a. Pencarian Fakta/masalah (Fact Finding)

Mencari dan mengumpulkan data dan fakta sebelum melakukan tindakan. Praktisi Humas harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan, oleh karena itu, humas perlu terlibat dalam pengumpulan fakta. Humas harus dapat memantau dan membaca tentang opini, sikap dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruh oleh tindakan perusahaan. Praktisi humas harus mengolah data factual yang telah ada, mengadakan perbincangan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data factual yang didapat.

b. Perencanaan (Planning)

Perencanaan disusun atas data fakta yang diperoleh. Berdasarkan pada rumusan masalah dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang disesuaikan dengan kepentingan public.

c. Komunikasi (communication)

Rencana yang disusun dengan baik sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan data atau fakta yang telah diperoleh, kemudian dikomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap public yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan.

d. Evaluasi (Evaluation)

Cara untuk mengetahui proses pelaksanaan telah selesai adalah dengan evaluasi. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini humas dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada, evaluasi dapat dilakukan secara continue dan hasil evaluasi akan menjadi dasar kegiatan humas berikutnya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prospektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, gambaran umum yang dimaksud adalah gambaran yang menerangkan obyek yang erat kaitannya dengan penelitian. Mulai dari sejarah maskot, tahapan-tahapan kampanye, pengenalan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Semarang Tahun 2020, cakupan daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang, serta tahapan-tahapan pemilihan lainnya.

2.1 SEJARAH MASKOT PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang resmi memperkenalkan Si Ciplos (Si Cipoh Mencoblos) sebagai maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Semarang 2020. Perkenalan Maskot dilakukan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-91. Senin (28/10/2019) dalam acara Launching Maskot dan Jingle di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang.

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa Si Ciplos adalah maskot pemenang dari lomba yang digelar sejak beberapa waktu lalu. Selain maskot KPU Kabupaten Semarang juga memperlombakan jingle. Perkenalan Si Ciplos bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda menurut Maskup Asyadi selaku Ketua KPU Kabupaten Semarang, diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa perbedaan pilihan selama pelaksanaan pemilihan adalah hal biasa dan masyarakat Kabupaten Semarang tetap bersatu.

Sementara itu Bupati Semarang, Mundjirin mengingatkan bahwa sukses penyelenggaraan Pemilihan bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020 bukan hanya tanggung jawab KPU melainkan juga masyarakat dan seluruh pihak. “Mudah-mudahan maskot dan jingle adalah yang terbaik karena hasil perlombaan dan bisa membantu memasyarakatkan dan mempopulerkan pemilihan bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020 sehingga partisipasi yang sudah tinggi terjaga,” tutur Mundjirin.

Sebagai informasi, maskot “Si Ciplos” sendiri merupakan hasil karya Muhammad Kusni, pemenang lomba cipta karya maskot sementara jingle "Semarang Guyub Serasi" adalah karya L Agus Wahyudi pemenang lomba cipta Jingle untuk pemilihan bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. Turut mengundang dalam kegiatan launching maskot dan jingle pemilihan bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020 antara lain adalah pimpinan FORKOMPINDA, organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Semarang, partai politik serta pelajar dan mahasiswa di lingkungan Kabupaten Semarang.

2.2 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di era pandemic Virus Corona. Protokol kesehatan pun diterapkan pada seluruh tahapan-tahapan pilkada, keputusan tersebut diterapkan seiring dengan dikeluarkannya peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, jadwal pilkada tahun 2020.

Tahapan kampanye akan dimulai pada 26 September- 5 Desember atau sebanyak 71 hari. KPU membagi masa kampanye calon kepala daerah ini dengan 3 fase, yaitu:

Fase Pertama, kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga atau kegiatan lain. **Fase Kedua**, KPU akan menggelar debat publik atau terbuka antar pasangan calon sebagai bagian dari kampanye calon kepala daerah. Fase pertama & kedua masa kampanye itu akan digelar pada 26 September sampai 5 Desember 2020. **Fase Ketiga**, KPU akan membuka kampanye calon kepala daerah melalui media massa, cetak, dan elektronik, pada 22 November sampai 5 Desember 2020.

2.3 PASANGAN CALON BUPATI & CAKUPAN DAERAH

KPU Kabupaten Semarang telah menetapkan dua pasangan calon yaitu Nomor Urut 1 dengan nama Hj. Bintang Narsasi, S.Pd. sebagai calon Bupati dan Wakilnya Drs. H. Gunawan Wibisono, M.M adapun Nomor Urut 2 dengan nama H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. sebagai calon bupati dan wakilnya H. Basari, S.T, M.Si.

Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kota Ungaran, dengan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang terdiri dari 19 kecamatan, 27 Kelurahan, dan 208 desa.

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang, adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Getasan		13
2.	Tengaran		15
3.	Susukan		13
4.	Kaliwungu		11
5.	Suruh		17
6.	Pabelan		17
7.	Tuntang		16
8.	Banyubiru		10
9.	Jambu	1	9
10.	Sumowono		16
11.	Ambarawa	8	2
12.	Bandungan	1	9
13.	Bawen	2	7
14.	Bringin		16
15.	Bancak		9
16.	Pringapus	1	8
17.	Bergas	4	9
18.	Ungaran Barat	5	6
19.	Ungaran Timur	5	5
TOTAL		27	208

(Sumber: <https://www.kpu-semarangkab.go.id/>)

2.4 TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

Sebelum diadakannya sebuah pemilihan umum daerah, banyak tahapan yang harus dilalui mulai dari awal tahun 2020 dengan diselenggarakannya sosialisasi pembentukan badan ADHOC, disusul dengan pembentukan PPK dan PPS, penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, lalu masuk ke tahap atau masa kampanye, laporan audit dan dana kampanye dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kegiatan pilkada serentak tahun 2020 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, dikarenakan wabah atau pandemi virus covid-19 yang sedang menyerang seluruh negara dan salah satunya negara Indonesia juga ikut terdampak. Di tengah pandemic covid-19, pemerintah bersama jajaran KPU daerah hingga pusat akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. KPU RI melarang adanya kampanye berupa pengumpulan massa. Sehingga KPU RI meminta agar para pasangan calon (Paslon) untuk menggelar kampanye yang kreatif tanpa mengumpulkan massa. Berikut adalah tahapan-tahapan kegiatan yang diadakan oleh KPU Kabupaten Semarang mengenai Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020:



((Sumber: <https://www.kpu-semarangkab.go.id/>)

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang diperoleh dengan wawancara mendalam mengenai Kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. Data yang disajikan diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dari pihak humas KPU Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang dalam upaya sosialisasi Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut, informan 1 Benny Nugraha selaku kasubag humas KPU Kabupaten Semarang, informan 2 Siti Solichah selaku anggota komisioner KPU Kabupaten Semarang, informan 3 Arif Suryawan selaku masyarakat sekitar Kabupaten Semarang, informan 4 Maranthika Dwi selaku masyarakat sekitar kabupaten semarang.

Dengan merujuk pada panduan pernyataan diatas, maka dilakukan pengumpulan data penelitian. Penelitian awalnya menggali data awal tentang tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum Kabupaten Semarang. Hal itu dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Data seperti ini akan digunakann peneliti untuk melengkapi informasi yang hendak dijadikan detail informasi agar terdeskripsikan material maupun lainnya.

Kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. Berpedoman pada beberapa Peran penting yaitu : Penemuan masalah (*Fact Finding*), Perencanaan dan Pemogramman (*Planning and Programming*), Aksi dan Komunikasi (*Taking Action and Communication*), Evaluasi (*Evaluation*).

3.1 PENEMUAN MASALAH (FACT FINDING)

Menurut analisi penulis Sosialisasi dibutuhkan dalam memberikan informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan statusnya sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu serta lembaga yang memiliki tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat termasuk sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020.

Dari hasil penelitian, kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang masih kurangnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang, walaupun sudah melebihi dari target Nasional yaitu 78,7 % sedangkan target nasional untuk partisipasi pemilih hanya 77,5%. Dari total rekapitulasi hasil penghitungan yaitu total suara sah 575.486, suara tidak sah 33.511 sehingga total 608.997 jumlah tersebut melebihi dari target nasional, dan diharapkan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersebut dapat terus meningkatkan partisipasi masyarakat ke tahun-tahun berikutnya, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk melihat program-program dan kendala dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang, dikatakan pemilih yang tidak memilih hak pilihnya kebanyakan adalah Pekerja dari luar kota yang tidak bisa pulang ke kabupaten semarang “ kalau pekerja tersebut berada di wilayah karantina, maka akan kesulitan. Sehingga memilih tidak pulang.

Menurut informan 1, Dengan cara gencar Sosialisasi. Dan selalu mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak suara/hak pilihnya dengan bijak. Karena 1 suara sangat berarti untuk kesejahteraan Kabupaten Semarang 5 tahun kedepan. Bahkan kita selalu membuat poster tentang Jangan Golput dengan desain desain baru dan menarik. Hal itu dilakukan ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, bahkan kita ajarkan pengetahuan itu sejak dini dengan menyasar siswa SD, SMP, SMA. Kita beri tahu dasar-dasar pemilu dan kita beri materi apa itu Golput pada sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Semarang, semakin mudah akses yang diberikan kepada masyarakat juga akan menunjang program-program dari KPU Kabupaten Semarang dan dinilai menambah partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan

yang diadakan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam mensukseskan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020.



Gambar 3.2 *Rapat Koordinasi di Aula Lantai 3 Kantor KPU Kabupaten Semarang*

3.2.PERENCANAAN DAN PEMOGRAMAN (PLANNING DAN PROGRAMMING)

Dalam melakukan sosialisasi peran KPU juga harus berperan dalam *Back-up management* yaitu bagaimana seorang humas KPU melakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan dan melakukan perencanaan dalam menangani krisis, bagaimana cara memback-up hal tersebut. Dengan kata lain bagaimana cara KPU Kabupaten Semarang melakukan perencanaan dalam menangani sebuah krisis yang harus cepat ditangani. Humas dituntut dapat menyelesaikan krisis dengan cepat dan tepat agar tidak mengganggu kinerja dari instansi tersebut kedepannya. Dengan adanya peran *Back-up management*, humas dapat mempersiapkan dan melakukan perencanaan dalam antisipasi dan menangani segera krisis yang terjadi .

Back-Up Management merupakan peranan seorang humas yang diyakini sebagai fungsi manajemen organisasi atau kelembagaan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam menangani krisis, humas KPU melakukan analisis dan perencanaan mendalam. Tujuannya agar back-up yang dilakukan dalam menangani krisis tepat dan dapat diselesaikan secara profesional. Kesalahan

humas dalam menangani krisis biasanya karena terburu-buru sehingga krisis melebar sebab penanganannya kurang tepat dan mengakibatkan waktu yang lama untuk menangani krisis, hal tersebut yang dihindari oleh humas KPU Kabupaten Semarang, maka dari itu diperlukan analisis mendalam dan perencanaan dalam menangani krisis yang diharapkan dapat diselesaikan secara tepat sehingga tidak menimbulkan krisis lainnya.

Menurut informan 1, bentuk peran *Back-up management* adalah lewat kegiatan Rapat Pleno atau Rapat koordinasi didalam rapat tersebut terdapat perencanaan dalam menangani krisis sesuai dengan POAC (*planning,organizing,actuating,controlling*).Rapat pleno dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten semarang dan kepala divisi terkait, sedangkan dalam rapat koordinasi dihadiri oleh semua anggota KPU Kabupaten Semarang untuk memberikan pendapat atas perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan yang akan datang. Dalam menangani krisis jika nantinya ada kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon bupati. Dalam menangani masalah tersebut ternyata instansi KPU tidak mengambil tindakan atau keputusan sendiri, melainkan membutuhkan pihak ke-3 dalam menyelesaikannya. Yang dimaksud pihak ke-3 ini adalah Bawaslu karena yang menilai ada atau tidaknya kecurangan itu wewenang dan tugas dari Bawaslu. Instansi KPU hanyalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan aturan dan UUD tentang Pemilu. Setelah Bawaslu, ada juga KPU Provinsi untuk mengkonsultasikan krisis yang dihadapi oleh KPU daerah, jika krisis masih belum bisa ditangani maka KPU Daerah akan mengkonsultasikannya terhadap KPU Pusat yaitu KPU RI. Rapat Pleno atau Rapat Koordinasi tersebut dilakukan rutin sebelum dan sesudah melakukan kegiatan-kegiatan atau program yang dijalankan oleh KPU kabupaten semarang.



Gambar 3.2 Rapat Koordinasi perencanaan Perbaikan DPS(daftarpemilih sementara) pada Pemilihan Bupati kabupaten Semarang Tahun 2020

3.3 MENKOMUNIKASIKAN DAN PELAKSANAAN (COMMUNICATION -ACTION)

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 Benny Nugraha, menjelaskan bahwa peran KPU sebagai *Communicator* dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan Sosialisasi. Hal tersebut termasuk dalam strategi humas KPU terkait Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, dengan cara mengadakan berbagai acara sosialisasi tentang pemilihan bupati, dengan cara tersebut masyarakat atau public dapat mengetahui informasi penting mengenai pemilihan bupati yang akan diselenggarakan. Selain kegiatan sosialisasi, KPU Kabupaten Semarang juga melakukan pendekatan dengan cara meminta kritik & saran dari masyarakat atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU kabupaten Semarang, dengan adanya hal tersebut semua pendapat dari masyarakat ditampung sebagai aspirasi yang diharapkan dapat membangun instansi KPU lebih baik lagi. Untuk tujuan sosialisasi yang lainnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta mendukung program-program dari KPU Kabupaten Semarang dalam mewujudkan pemilu yang sesuai harapan dan terhindar dari hal-hal yang tidak

diinginkan. Terutama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak serta mengurangi angka golput (golongan putih).

Peran KPU Kabupaten Semarang yaitu melakukan kegiatan Sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena peran masyarakat disini sangatlah penting sebagai orang yang menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai target atau orang yang akan menerima informasi atas kegiatan sosialisasi mengenai pemilu, sehingga masyarakat mengetahui dengan baik informasi yang diberikan oleh instansi KPU Kabupaten Semarang selaku penyelenggara pemilu, lewat kegiatan sosialisasi yang gencar dilakukan.

Informan 1 juga mengatakan bahwa, kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Sosialisasi Pembentukan PPK Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, Sosialisasi Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, Ngopi:Ngobrolin Pemilu, SiswaSMP Belajar Proses Pemilu, Semangat Anti Politik Uang dikelas Pemilu SMA 1 Bergas, Pendidikan Pra Pemilih di SMPN 3 Tuntang, Pembelajaran Demokrasi di SMA N 1 Tenganan.



Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi dalam bentuk event. Ngopi: Ngobrolin Pemilu

3.4 EVALUASI (EVALATION)

Selain melakukan evaluasi dalam semua kegiatan sosialisasi. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Semarang juga perlu menjalin hubungan baik dengan Stakeholders, seluruh masyarakat, dan juga pihak media. Menjalinkan hubungan yang positif diperlukan oleh sebuah instansi untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, agar KPU juga lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya. Secara logika, jika suatu instansi pemerintah mengalami krisis kepercayaan dari public atau masyarakat umum, maka akan membawa dampak negatif terhadap citranya. Bahkan akan terjadi penurunan citra sampai pada titik yang paling rendah (*lost of image*).

Menurut informan Benny Nugraha dan Siti Solchah, menjalin hubungan yang baik dilakukan dengan cara sebagai berikut; menjalin hubungan baik dengan masyarakat, media, dan juga komunitas. Sebagai Humas sebuah instansi dituntut untuk melek teknologi dan memanfaatkan teknologi yang lebih modern seperti menggunakan E-mail untuk berkomunikasi, memanfaatkan media social, untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat. Hal-hal tersebut juga diyakini dapat memberikan kesan baik didepan masyarakat.

Informan 1 juga menambahkan, KPU Kabupaten Semarang mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan Media. Salah satu kegiatannya adalah *Media Gathering* yang dihadiri oleh wartawan dari Suara Merdeka. *Media Gathering* yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan jurnalis-jurnalis untuk sharing dan membahas topic seputar Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, biasanya diadakan di aula lantai 3 gedung KPU Kabupaten Semarang. Adanya kegiatan *Media Gathering* bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan media karena, media dianggap sebagai Stakeholders yang dapat mengubah pandangan public terhadap instansi KPU Kabupaten Semarang. Media sekaligus berperan dalam menyebarkan informasi, tidak hanya itu. Media juga sebagai wadah untuk mengetahui informasi tentang krisis, melalui media instansi KPU dapat mengetahui pandangan public terhadap mereka.

Tidak hanya itu, setelah segala upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam menjalin hubungan baik dengan public maupun media pada akhirnya membuahkan hasil dalam bentuk kepercayaan, yaitu adanya dukungan dari aliansi *Gempur* (Gerakan masyarakat pekerja Ungaran) mereka dengan sukarela datang ke kantor KPU Kabupaten Semarang menyatakan bahwa mereka akan membantu KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. KPU Kabupaten Semarang

menerima audiensi aliansi *Gempur*(*Gerakan masyarakat pekerja Ungaran*) audiensi tersebut dihadiri oleh 30 anggota. Ketua *Gempur* Budi Cahyo menyatakan bahwa anggotanya mencapai 40ribu lebih yang terdiri dari para pekerja buruh. Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi memberikan apresiasi dan menyambut baik komitmen *Gempur*, selanjutnya KPU akan berkoordinasi dengan *Gempur* sebagai tindak lanjut dari audiensi yang telah dilakukan, demi suksesnya Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020.



Gambar 3.4 Kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan oleh KPU Kab. Semarang



Gambar 3.4 Audiensi oleh Aliansi GEMPUR (*Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran*)

BAB IV

PEMBAHASAN KEGIATAN SOSIALISASI KPU KABUPATEN SEMARANG

DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

Pada bab ini akan dibahas hasil temuan penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan menganalisis hasil temuan peneliti mengenai Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020 dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada.

4.1 Analisis Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada pilbup Kabupaten Semarang Tahun 2020

Menurut Scott M. Cutlip and Allen H. Centre , dalam **Ruslan (2008:25)** mengungkapkan bahwa Public relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya.

Hal ini yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Adanya pelaksanaan Pilbup membuat KPU Kabupaten Semarang harus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat Kabupaten Semarang mengetahui adanya pelaksanaan Pilbup Kabupaten Semarang. Sosialisasi ini diharapkan masyarakat lebih sadar dan peduli untuk turut serta mendukung pelaksanaan Pilbup Kabupaten Semarang Tahun 2020 dengan memberikan hak suaranya ke TPS, dengan begitu jumlah partisipasi Pilbup Kabupaten Semarang Tahun 2020 dapat meningkat. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan sosialisasi secara efektif juga banyak ditentukan oleh strategi sosialisasi yang digunakan dalam beberapa kasus.

Menurut Adnanputra (**Ruslan, 2003:109**), Strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang

pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dari proses manajemen. Strategi pada hakikatnya merupakan suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Komunikasi secara efektif dan strategis pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mengubah sikap (*how to change the attitude*).
- b. Mengubah opini (*to change the opinion*).
- c. Mengubah perilaku (*to change behavior*).

Strategi ini pula yang dilakukan oleh Humas KPU Kabupaten Semarang dalam menangani masalah ketidakhadiran masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Semarang. Ada lima indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi sosialisasi Humas pada **Cutlip (2006 : 320)** :

4.1.1 Penemuan Masalah (fact finding)

Pada tahap penemuan masalah atau fact finding merupakan proses tahap pertama untuk menentukan langkah – langkah atau tindakan untuk tahap selanjutnya. Langkah identifikasi masalah ini memberi landasan bagi semua proses pemecah masalah dengan menentukan “Apa yang terjadi saat ini” (**Cutlip 2006 : 320**). KPU Kabupaten Semarang dalam mencari permasalahan apa yang terjadi tidak melakukan proses fact finding secara khusus seperti yang dibentuk organisasi maupun perusahaan lain, dalam artian melakukan penelitian secara langsung melalui questioner atau dengan metode lain, namun yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang hanya sebatas melakukan identifikasi, pengamatan dan melakukan kajian terbatas dengan catatan ketidakhadiran pemilih sebuah inovasi dari KPU sendiri untuk mengetahui alasan seseorang tidak hadir saat Pemilihan berlangsung, dan melalui Jaringan pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR).

Berdasarkan hasil pengidentifikasian dan pengamatan tersebut, KPU Kabupaten Semarang mengetahui adanya berbagai ancaman yang muncul dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Semarang seperti rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Semarang terhadap Pemilu maupun Pilkada yang disebabkan minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, kurangnya pengetahuan akan pendidikan pemilih dan politik, dan ketidakpercayaan kepada lembaga – lembaga politik. Untuk itu sangatlah penting pengamatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang mengenai kebutuhan apa saja yang nantinya diperlukan Pilbup Kabupaten Semarang mendatang agar jumlah ketidakhadiran masyarakat ke TPS berkurang, karena Tugas

KPU Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan Pilkada salah satunya adalah meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut John E. Marston dalam **Nurjaman dan khairul umam (2012 : 100-105)** mengatakan public relations adalah suatu bidang yang memerlukan segi perencanaan yang matang (*planned*), juga “komunisasi” yaitu gabungan antara melakukan komunikasi dan sekaligus membujuk (*persuasive*), dengan tujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan kesadaran atau pengertian dan mencari dukungan publik dan sasaran khalayaknya (*target audience*), sekaligus mempengaruhi serta membujuk sasaran khalayaknya yang terkait dan dituju (*significant public*).

Langkah awal untuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Sosialisasi Pembentukan PPK Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, Sosialisasi Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, Ngopi:Ngobrolin Pemilu, SiswaSMP Belajar Proses Pemilu, Semangat Anti Politik Uang dikelas Pemilu SMA 1 Bergas, Pendidikan Pra Pemilih di SMPN 3 Tuntang, Pembelajaran Demokrasi di SMA N 1 Tenganan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang bertujuan mengenalkan lebih awal kepada masyarakat tentang perhelatan Pilbup Kabupaten Semarang yang akan digelar tahun 2020, tepatnya Rabu 9 Desember 2020. Setelah mendapatkan informasi dari kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif lagi di setiap tahapan Pilbup Kabupaen Semarang 2020 mulai dari Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye, sampai menggunakan Hak pilihnya pada hari H. Agar masyarakat lebih mengetahui tentang kepemiluan KPU Kabupaten Semarang menyediakan sarana Rumah Pintar Pemilu seperti data sejarah pemilu, penyelenggaraan pemilu, hasil pemilu dan lain – lain, RPP bisa dikunjungi oleh pelajar mulai anak SD sampai Perguruan Tinggi maupun masyarakat umum.

KPU Kaabupaten Semarang juga resmi meluncurkan Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupate Semarang, di Rumah Dinas Bupati Semarang pada hari Senin 28 Oktober 2019 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang dihadiri antara lain FORKOMPINDA, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Organisasi Masyarkat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Semarang dengan meluncurkan maskot Si Ciplos (Si Cipoh Mencoblos) dengan slogan “Semarang Guyub Serasi” melengkapi sosialisasi tersebut. Pemilihan. KPU Kabupaten Semarang berharap dengan maskot tersebut dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Kupaten Semarang, baik kepada pemilih maupun pasangan calon

peserta Pilbup Kabupaten Semarang agar dapat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Semarang.

Beberapa kegiatan awal sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Semarang sebagai pembukaan penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Semarang 2020 yang kemudian KPU Kabupaten Semarang akan melakukan perencanaan program kegiatan sosialisasi yang lebih efektif di tahap selanjutnya.

4.1.2 Perencanaan dan Pemograman (Planning and Programming)

Tahap planning and programming merupakan tahap perencanaan dan menentukan program yang akan dilakukan. Pada tahap ini berdasarkan fakta – fakta yang terkumpul pada tahap penemuan masalah oleh KPU Kabupaten Semarang digunakan untuk merencanakan strategi, program, tujuan, tindakan, serta bagaimana cara penyampaianannya.

Program sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan strategi yang digunakan KPU Kabupaten Semarang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilbup Kabupaten Semarang tahun mendatang .

Kemudian berkenaan dengan program pendidikan pemilih KPU Kabupaten Semarang juga mengharapkan kualitas pemilih, terutama pemilih pemula pelajar SMA dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang berupa KPU Goes To School untuk pemilih pemula. Untuk masyarakat umum Kabupaten Semarang, KPU akan mensosialisasikan secara langsung melalui face to face kepada masyarakat bersama – sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu dan pilkada.

Dalam pendidikan pemilih juga tidak sepenuhnya KPU Kabupaten Semarang yang memberikan penyuluhanannya, namun yang lebih intensif memberikan pendidikan pemilih yaitu partai politik, Kesbanglinmas atau lembaga – lembaga masyarakat lain secara bersama memberikan suatu kontribusi dalam proses sosialisasi seseorang dan menggunakan hak politiknya untuk berperan dan membentuk sikap dan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti konsep teori yang dikemukakan oleh **M Linggar Anggoro (2000:3)**. Hal itu seperti apa yang diterapkan oleh KPU Kabupate Semarang, bahwa salah satu tujuan KPU Kabupaten Semarang adalah melakukan planning and programming dalam Kegiatan sosialisasi pada penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Semarang Tahun 2020.

KPU Kabupaten Semarang menargetkan sasaran dari pelaksanaan sosialisasi adalah semua elemen masyarakat, terutama pemilih pemula, perempuan dan penyandang disabilitas karena memang sumbang suara dari mereka itu sangat luar biasa jika KPU berhasil menggandeng mereka. Strategi yang digunakan untuk sosialisasi pilgub Jateng adalah yang mengintegrasikan sikap, berbagai strategi yang meliputi publikasi media, komunikasi tatap muka, dan mobilisasi sosial dengan tidak hanya melibatkan KPU tetapi juga seluruh stakeholder dari KPU seperti Pemerintah Daerah, Partai Politik, LSM, Ormas, Tokoh Agama, Media Massa dan Perguruan Tinggi supaya kegiatan sosialisasi berjalan secara masif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh **Frank jefkins (2003:9-10)** Humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian.

4.1.3 Aksi dan Komunikasi (Taking Actions and Communication)

Tahap ketiga yaitu taking actions and communication, Tahap yang paling penting untuk di implementasikan dari kegiatan perencanaan dan strategi sosialisasi yang telah di rencanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada bab sebelumnya. Untuk mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, KPU Kabupaten Semarang mempunyai peranan penting untuk mewujudkannya. Sesuai dengan pendapat Bernay, dalam **Soemirat dan Ardianto (2001 : 1)** Public Relations mempunyai fungsi yaitu :

- a. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga

sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Pada upaya penyampaian informasi, KPU Kabupaten Semarang sangat memperhatikan khalayaknya yang menjadi sasarannya, karena kebutuhan informasi tiap khalayak berbeda – beda seperti pemilih pemula berbeda dengan pemilih yang bukan pemula. Yang pemula masih terklasifikasi, yang kelompok pelajar dengan mahasiswa tentu berbeda. Kelompok penyandang disabilitas kebutuhannya materi dan medianya juga pasti berbeda dengan warga negara yang lainnya. Pesan yang khusus sifatnya

ditujukan kepada publik tertentu maka penyampaianya memerlukan media yang khusus pula (Muslimin, 2004 : 3).

Proses sosialisasi kali ini didesain dengan konsep gembira atau fun untuk menarik perhatian masyarakat . KPU dan Bawaslu atau Panwaslu juga sudah menerobos cara-cara konvensional untuk menyampaikan atau menyosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Seperti melalui media sosial, media massa, media luar ruang, pertemuan-pertemuan berbagai kelompok masyarakat. Melalui cara tersebut masyarakat dapat mengerti kemudian menggunakan hak konstitusionalnya dan diharapkan semua elemen masyarakat dapat merawat demokrasi yang baik di Kabupaten Semarang. Hal ini juga dapat menghindari masyarakat dari berbagai hal yang sifatnya mengumbar ujaran kebencian, fitnah tidak penting, serta mengorganisasikan diri dalam kelompok “fitnater- fitnater”. Baik pemimpin, partai politik, maupun kandidat harus bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik. KPU Kabupaten Semarang bersikap persuasif dengan melakukan sosialisasi yang mengundang berbagai tokoh masyarakat seperti Pemerintah Daerah, Partai Politik, LSM, Ormas, Tokoh Agama, Media Massa dan Sekolah Menengah Atas tentang pelaksanaan Pilbup. Pendekatan ini bisa dikatakan berhasil, karena masyarakat lebih antusias dengan kegiatan ini. Sesuai dengan teori yang memaparkan bahwa suatu kegiatan komunikasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif. Yaitu sebuah usaha untuk mempengaruhi publiknya dengan penjelasan – penjelasan dan ajakan tercapai saling pengertian (*mutual understanding*) dan hubungan timbal balik yang menguntungkan (*reciprocal relations*) (Setyodarmojo, 2003: 68).

Dalam cara mengurangi jumlah ketidakhadiran pemilih KPU Kabupaten Semarang juga akan memperketat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara meminta kepastian kepada keluarga dari yang merantau, apabila tidak dapat memberikan hak suaranya akan dicoret namanya walaupun masih punya KTP berdomisili Semarang. Tetapi pemilih tersebut jika ingin menggunakan hak suaranya, maka dapat memberikan suaranya diatas pukul 12 siang dengan cara menunjukan KTP berdomisili Kabupaten Semarang. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi Pilbup Kabupaten Semarang. Seperti pada Pilbup 2015 lalu, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang meninggal masih terdaftar dan mengikuti Pemilu dikarenakan warga yang meninggal setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan maka nama pemilih tersebut masih harus ditetapkan. Termasuk alih status, Jika saat ini masih terdaftar sebagai anggota TNI tidak boleh terdaftar kemudian pada saat hari Pemilihan sudah menjadi pensiunan ,

hal itu dapat KTP sesuai domisilinya untuk memberikan suaranya ke TPS. KPU juga akan menetapkan Pilbupnya pada hari Senin supaya masyarakat dapat mengingat bahwa hari Senin adalah hari pemilu.

Walaupun KPU Kabupaten Semarang telah menggunakan berbagai macam media dalam melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Semarang untuk mencapai keberhasilan sosialisasi, pesan yang disampaikan sedemikian rupa kadang kala dengan menciptakan stimulan (*rangsangan*) sehingga komunikan merasakan respect terhadap pesan yang ingin disampaikan. Selain itu timing yang tepat juga perlu diperhatikan karena sangat menentukan apakah komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran tidak adanya salah pengertian.

Salah satu faktor penting dalam komunikasi Humas menurut Cutlip & Center dalam **Setyodarmojo (2003 : 117)** ialah Clarity yang berarti pesan – pesan itu haruslah mempergunakan kata – kata atau istilah yang sederhana, dengan demikian maksud akan menjadi jelas dan mudah dimengerti. Dalam upaya mensosialisasikan Pilbup Kabupaten Semarang mengenai ajakan untuk berpartisipasi dengan menggunakan hak suaranya KPU Kabupaten Semarang telah sesuai dengan teori diatas yaitu pesan – pesan yang akan ,disampaikan menggunakan kata – kata atau istilah yang sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti secara jelas oleh sasaran pada saat melakukan sosialisasi.

4.1 4 Evaluasi (Evaluation)

Tahap terakhir yang dilakukan KPU

setelah melakukan semua tahap penemuan masalah, perencanaan dan pelaksanaan strategi sosialisasi kaitannya dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Semarang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Jika dilihat dari pelaksanaan Pilbup Kabupaten Semarang sebelumnya evaluasi yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang dilakukan setiap satu bulan setelah program tersebut dijalankan dan setelah keseluruhan program diselenggarakan sampai pada saat proses perhitungan suara. Hasil evaluasi pada tahun sebelumnya juga dapat dijadikan patokan pelaksanaan sosialisasi Pilbup mendatang, untuk meminimalisir kekurangan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat diperbaiki kedepannya. Tanpa adanya evaluasi KPU Kabupaten Semarang tidak akan mengetahui kekurangan, kendala dan masalah – masalah yang akan dihadapi. Kendala itu adalah regulasi,

anggaran, sumber daya manusia atau personel yang terbatas, sikap apatisme masyarakat, partisipasi dan kepercayaan publik serta kondisi geografis dan infrastruktur.

KPU juga berupaya memperbaiki proses di beberapa tahapan, di antaranya proses pemutakhiran data dan daftar pemilih, sosialisasi, pengelolaan dan pembebanan biaya kegiatan KPU Kabupaten Semarang. Perbaikan proses dalam pelaksanaan Pilbup tahun 2020 juga akan memperbaiki proses penganggaran yang mampu melakukan efisiensi hingga 31,9 miliar, dana tersebut akan di gunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dan belanja operasional selama proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang.

Evaluasi dilakukan setelah Pilbup dilaksanakan dengan cara mengetahui kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilgub. Menurut **Morissan dalam bukunya Manajemen Public Relations (2008:225)** mengatakan bahwa evaluasi yang signifikan terhadap suatu program kehumasan haruslah dilakukan berdasarkan pengukuran secara ilmiah mengenai kesadaran atau perubahan pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak mengenai organisasi atau perusahaan. Tetapi keberhasilan sosialisasi tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan keberhasilan dan tingkat presentasi hasil suara yang dihitung, karena tingkat presentase suara mutlak berhasil berapapun jumlah pemilih yang hadir. Menurut Humas KPU Kabupaten Semarang tingkat keberhasilan Pilkada tidak diukur dengan tingkat kehadiran dan jumlah pemilih. Walaupun tingkat kehadirannya hanya satu orang atau lebih tetapi suara dianggap sah maka dikatakan berhasil. Namun kegiatan sosialisasinya dianggap kurang berhasil karena sosialisasi diukur dari banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada. Evaluasi sosialisasi dilakukan oleh pihak – pihak internal KPU Kabupaten Semarang saja.

Hal – hal yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah apakah program Goes to School sudah mampu menarik pemahaman pelajar SMA serta kepedulian mereka terhadap lingkungannya, Apakah penyandang disabilitas sudah merasa terpenuhi dengan pelayanan berupa fasilitas yang diberikan oleh KPU dan apakah memberikan dampak positif bagi mereka, kemudian sosialisasi apakah sangat bermanfaat dan membantu bagi masyarakat yang kurang memahami adanya Pemilu dan Pilkada dll. KPU Kabupaten Semarang mengevaluasi satu demi satu program kegiatan sosialisasi jika hasil dari evaluasi kegiatan sosialisasi berhasil maka KPU Kabupaten Semarang akan terus menetapkan program – program tersebut.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penyusunan Tugas Akhir (TA), penulis melihat bahwa Kegiatan KPU Kabupaten Semarang sudah melaksanakan Peran-peran Dalam Upaya Mensosialisasikan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020. Setelah melakukan beberapa tahapan yaitu dengan wawancara dengan informan dan berdasarkan dari data yang ditemukan oleh penulis dilapangan, maka berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang diperoleh oleh penulis.

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang. Peran KPU yang sudah dilakukan dalam Upaya Mensosialisasikan Kegiatan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020, dan beberapa aktivitasnya sebagai berikut:

- Peran KPU Kabupaten Semarang dalam kegiatan Sosialisasi, dilakukan dengan cara melakukan komunikasi Langsung dan tidak langsung dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun tatap muka ke masyarakat, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak seperti; spanduk, poster, pamflet, baliho, dan umbul-umbul yang dipasang di jalan protokol disekitar Kabupaten Semarang. KPU kabupaten Semarang juga melakukan komunikasi dua arah (*two way communication*) dengan cara meminta kritik & saran pada masyarakat sebagai wujud timbal balik (*feedback*).
- Peran KPU Kabupaten Semarang dalam kegiatan Sosialisasi, juga dilakukan dengan cara membangun dan menjalin hubungan baik dengan stakeholders, baik masyarakat, media, maupun komunitas. KPU Kabupaten Semarang membuka audiensi dengan komunitas aliansi Gempur (Gerakan masyarakat pekerja Ungaran) sebagai cara untuk menjalin dan membina hubungan yang baik, demi menciptakan rasa saling menguntungkan dan menambah relasi.
- Peran KPU Kabupaten Semarang dalam menjalankan Sosialisasi, sebagai penunjang fungsi manajemen dengan cara melakukan perencanaan dalam rapat pleno dan rapat koordinasi, didalam rapat pleno dihadiri oleh ketua KPU kabupaten Semarang dan kepala

divisi terkait, sedangkan rapat koordinasi dihadiri oleh semua anggota KPU Kabupaten Semarang untuk membuat perencanaan untuk kegiatan yang akan diadakan, melakukan perencanaan penanganan krisis, dan juga evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang.

- Dalam upaya mensosialisasikan Pilbup 2020 instansi KPU Kabupaten Semarang, humas melakukannya dengan cara membuka layanan *Help Desk* yang dibuka di empat kecamatanyaitu Bawen, pabelan, tengaran, dan bandungan. Sebagai jawaban dari kritik & saran yang telah diberikan oleh masyarakat. Kritik & saran tersebut sangat membangun untuk KPU Kabupaten Semarang kedepannya.

5.2 SARAN

Untuk mensukseskan kegiatan pemilu yang akan datang, adapun saran-saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna untuk instansi KPU Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

- Diharapkan KPU Kabupaten Semarang banyak mengadakan event-event hiburan yang menarik. Seperti; Event pentas kesenian, stand bazaar, dan pasar malam. Event tersebut diadakan untuk menarik minat masyarakat untuk hadir dan KPU Kabupaten Semarang dapat menyebarkan informasi tentang Pemilihan Bupati melalui event tersebut.
- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, diharapkan KPU Kabupaten Semarang juga dapat berfokus pada pemilih pemula dengan menunjuk Siswa SMP dan SMA sebagai duta ANTI GOLPUT agar mereka dapat menjadi contoh demokrasi dalam sekolah mereka, sekaligus dapat menanamkan jiwa demokrasi sejak dini, sehingga mereka juga dapat mengajak teman-teman lainnya untuk menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan apapun.

Daftar pustaka

Adnanputra (Ruslan, 2003) *Strategi Public Relations* ,PT.RajaGravindo Persada, 2003.

Cutlip, Center dan Broom, Rachmadi, (1994). *Effectives peran Humas* . Jakarta: Kencana

Cutlip (2006) :*Manajemen Public Relations, Konsep dan Palikasinya* Jakarta : Kencana

Efendi (2009:32) *Strategi Sosialisasi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Frank jefkins (2003) *Public Relations* Edisi Kelima. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga

John E. Marston dalam Nurjaman dan khairul umam (2012) *Komunikasi & Public Relations*.

Bandung : CV Pustaka Setia

Morissan. (2008). *Manajemen Public Relations, Strategi Menjadi Humas Profesional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muslimin, (2004). *Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian*. Malang: UMM Press

M Linggar Anggoro (2000:3) *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya*. Jakarta Bumi

Ruslan, Rusady, (2006).*Peran Public Relations atau Humas dalam Komunikasi*.Jakarta:Raja Grafindo Persada

Scott M. Cutlip and Allen H. Centre, / Cutlip, Scott M. et. al. (2007). *Effective Public Realtions*,

Jakarta : Kencana.Akasara

Setyodarmojo (2003). *Pubvlic Relations: Pengertian Fungsi dan Peranannya*. Surabaya: Papyrus

Soemirat dan Ardianto (2001) *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Website :

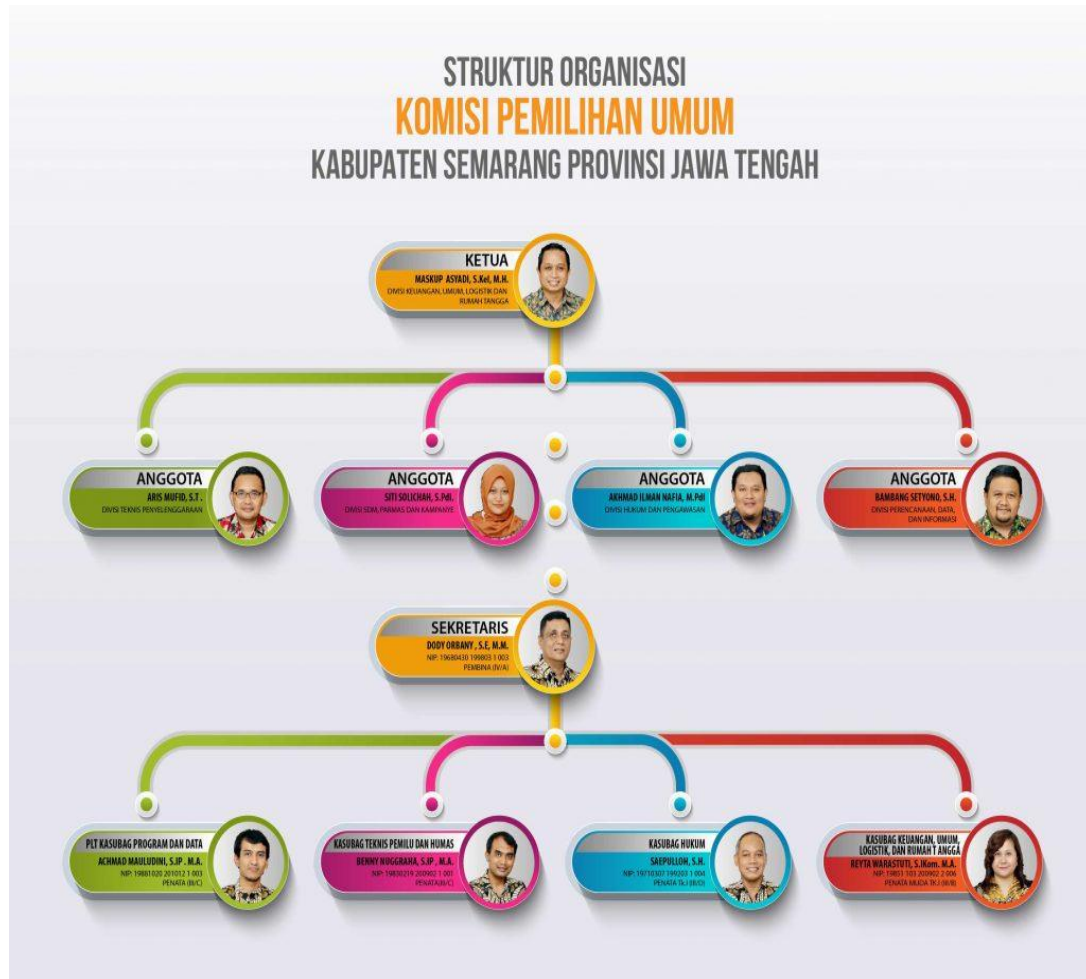
<https://www.kpu-semarangkab.go.id/>

Lampiran

1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang

a. Komisioner KPU Kabupaten Semarang

(Gambar 2.7.1 merupakan bagan struktur organisasi Komisioner KPU Kabupaten Semarang)



b. Struktur Organisasi Anggota KPU Kabupaten Semarang

(Gambar 2.7.2 Merupakan bagan struktur organisasi Anggota KPU Kabupaten Semarang)



2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

3. Sejarah Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang pertama kali didirikan oleh Raden Kaji Kasepuhan (dikenal sebagai Ki Pandan Arang II) pada tanggal 2 Mei 1547 dan disahkan oleh Sultan Hadiwijaya. Kata “Semarang” konon merupakan pemberian dari Ki Pandan Arang II, ketika dalam perjalanan ia menjumpai deretan pohon asam (Bahasa Jawa: asem) yang berjajar secara jarang (Bahasa Jawa: arang-arang), sehingga tercipta nama Semarang.

Ketika masa pemerintahan Bupati Raden Mas Soeboyono, pada tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Kotapraja (gemente) Semarang, sehingga terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu kotapraja yang dipimpin oleh burgenmester, dan kabupaten yang dipimpin oleh bupati.

Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Bupati Iswanto (1969-1979), ibukota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang).

Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kota Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai kota kawedanan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang.

Pada tahun 2005, kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni Ungaran Barat, Semarang dan Ungaran Timur, Semarang.

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah kerja KPU Kabupaten Semarang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang terdiri dari 19 kecamatan. KPU Kabupaten Semarang berkedudukan di Ungaran yang merupakan ibukota Kabupaten Semarang. KPU Kabupaten Semarang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan serta bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

wewenangannya. Dalam menjalankan tugas, KPU Kabupaten Semarang dibantu oleh sekretariat.

Slogan Kabupaten ini adalah sebagai Bumi Serasi yang merupakan akronim dari “Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera, dan Indah”.

5. Visi dan Misi

- Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Misi

- a.) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b.) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c.) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d.) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e.) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

6. MAKNA LOGO KOMISI PEMILIHAN UMUM



Arti Lambang KPU :

1. Bentuk lambang secara umum menggambarkan daun pintu dengan tiga buah engsel, melambangkan peran KPU sebagai pembuka generasi baru dalam kepengurusan organisasi HMK.
2. Bentuk dasar pintu berupa persegi, melambangkan keyakinan diri, kekompakan, ketegasan dalam mengambil kebijakan, dan ketekunan bekerja dalam KPU.
3. Bentuk pintu mempunyai sudut bulat, melambangkan keluwesan gerak langkah KPU dalam mengemban tugasnya dan mampu berkreaitivitas serta mengambil kebijakan yang selaras dengan tujuan HMK.
4. Tiga buah engsel daun pintu melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat sebagai landasan kerja KPU maupun HMK.
5. Tulisan KPU, HMK FMIPA UNDIP berarti bahwa lambang tersebut adalah lambang Komisi Pemilihan Umum Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas MIPA Universitas Diponegoro.

6. Bentuk tulisan adalah huruf kecil (non-kapital), melambangkan KPU senantiasa bersedia membuka diri dan bekerja sama, tidak merasa besar hati, serta mampu melangkah ke arah yang lebih baik dalam setiap masa.
7. Gambar kotak suara serta surat suara yang dimasukkan menggambarkan bahwa pelaksanaan suksesi yang diprogramkan oleh KPU dilaksanakan secara luber dan jurdil

7. Sejarah Maskot Pilbub 2020 (Si Ciplos)



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang resmi memperkenalkan Si Ciplos (Si Cipoh Mencoblos) sebagai maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Semarang 2020. Perkenalan Maskot dilakukan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-91. Senin (28/10/2019) dalam acara Launching Maskot dan Jingle di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang.

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asy'ari dalam sambutannya mengatakan bahwa Si Ciplos adalah maskot pemenang dari lomba yang digelar sejak beberapa waktu lalu. Selain maskot KPU Kabupaten Semarang juga memperlombakan jingle.

Perkenalan Si Ciplos bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda menurut Maskup diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa perbedaan pilihan selama pelaksanaan pemilihan adalah hal biasa dan masyarakat Kabupaten Semarang tetap bersatu.

Sementara itu Bupati Semarang, Mundjirin mengingatkan bahwa sukses penyelenggaraan Pilbup Semarang 2020 bukan hanya tanggung jawab KPU melainkan juga masyarakat dan seluruh pihak. “Mudah-mudahan maskot dan jingle adalah yang terbaik karena hasil perlombaan dan bisa membantu memasyarakatkan dan mempopulerkan Pilbup Semarang 2020 sehingga partisipasi yang sudah tinggi terjaga,” tutur Mundjirin.

Sebagai informasi, maskot “Si Ciplos” sendiri merupakan hasil karya Muhammad Kusni, pemenang lomba Cipta Karya Maskot sementara jingle "Semarang Guyub Serasi" adalah karya L Agus Wahyudi emenang Lomba Cipta Jingle untuk Pilbup Semarang 2020.

Turut mengundang dalam kegiatan Launching Maskot dan Jingle Pilbup Semarang Tahun 2020 antara lain adalah pimpinan FORKOMPINDA, Organisasi Perangkat Daerah terkait, organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Semarang, partai politik serta pelajar dan mahasiswa di lingkungan Kabupaten Semarang. (kpu kab semarang/ed diR)

Gambaran Umum Humas KPU Kabupaten Semarang

Didalam instansi KPU Kab. Semarang terdapat 3 Humas dalam Subag yang berbeda, yaitu:

- a.) Subag Keuangan, Umum, logistic, dan rumah tangga
- b.) Subag Hukum
- c.) Subag Teknis

Subbag Keuangan, Umum, Logistic dan Rumah Tangga

Biasanya mengurus segala hal yang berhubungan dengan uang perbendaharaan dan segala aktifitas membeli barang-barang kebutuhan kantor

Subbag Hukum

Mengurus segala hal yang berkaitan dengan Hukum. Contohnya jika ada gugatan atas pelayangan suara atau tuntutan lainnya yang bersangkutan dengan KPU Kabupaten Semarang

Subbag Teknis

Mengurus segala hal teknis di KPU Kabupaten Semarang. Segala aktifitas Humas juga berpusat di subbag ini. Mulai dari desain, pembuatan MMT, membuat video dan publikasi lainnya

Didalam Sub bagian tersebut, masing-masing ada satu Humas yang bekerja dan membantu segala aktivitas yang berkaitan dengan bidang komunikasi atau Kehumasan..Pentingnya peran dan tugas Humaslah yang membuat sebuah instansi membutuhkan Humas setidaknya lebih dari satu.

Humas sangatlah penting bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Dalam hal ini humas bertugas sebagai media untuk memperluas program-program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat luas. Sebagai Dinas milik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum sangatlah memerlukan peran seorang *Public Relation Officer* sebagai media dan juga penyebar luas program yang ada di Dinas ini baik terhadap stakeholder Internal maupun External.

Komisi Pemilihan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Pemilu, yang memiliki tugas serta peranan penting dalam pengawasan dan pengembangan SDM. Kehadiran divisi Humas akan membantu Komisi Pemiliha Umum mencapai tujuan utamanya sebagai penyelenggara Pemilu yang tertib serta bereputasi baik. Strategi Humas lebih kepada membangun kepercayaan dan pandangan baik kepada *stakeholder* dan publik.

INTERVIEW GUIDE

PERAN HUMAS KPU DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

1. Bagaimana Strategi Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam upaya melakukan sosialisasi tentang Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020?
2. Bagaimana cara Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang menangani aduan atau kritik tentang kinerja selama mempersiapkan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020?
3. Bagaimana cara dari Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam menganalisis perencanaan kampanye yang dilakukan?
4. Apakah dalam melakukan kampanye, Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang menerapkan rancangan strategi kampanye?
5. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam menangani krisis?
6. Bagaimana bentuk back-up management yang dilakukan oleh KPU ketika menangani krisis?
7. Apakah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang memerlukan pihak ke-3 dalam menyelesaikan sebuah krisis yang dihadapi? (Pihak ke-3 bisa perorangan dari luar instansi ataupun organisasi yang dianggap bisa memberikan opini)
8. Apa saja bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang?
9. Media apa saja yang digunakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam menyebarluaskan informasi dalam upaya mensosialisasikan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020?
10. Selain social media, media apa yang digunakan untuk mensosialisasikan pemilihan bupati kabupaten semarang tahun 2020?
11. Apa alasan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang memilih media tersebut, untuk mensosialisasikan adanya pemilihan bupati?
12. Bagaimana cara KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam mengurangi tingkat golput pada pemilihan bupati tahun 2020?

13. Bagaimana cara humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang mengukur tingkat keberhasilan dari program-program yang telah dijalankan untuk mensukseskan pemilihan bupati kabupaten semarang tahun 2020?
14. Bagaimana strategi humas dalam menangani apabila ditemukan kecurangan yang terjadi pada pemilihan bupati kabupaten semarang tahun 2020?
15. Bagaimana solusi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang selaku penyelenggara pemilihan. Jika terbukti ada kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati?

TRANSKRIP WAWANCARA

Pertanyaan diajukan kepada Bapak Benny Nuggraha. Beliau selaku Kasubag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Semarang.

Benny Nuggraha – Kasubag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Semarang

1. Bagaimana Strategi Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam upaya melakukan sosialisasi tentang Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020?

“Sebelum melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi. Kami selaku instansi penyelenggara pemilu di daerah kabupaten semarang tentu nya menunggu putusan dari KPU Pusat kapan waktu yang tepat untuk diperbolehkan melakukan kegiatan sosialisasi. Setelah mendapatkan aba-aba dari KPU Pusat.KPU Kabupaten Semarang menunggu penyebaran bahan sosialisasi.Kegiatan pertama yang dilakukan adalah kegiatan komunikasi tatap muka yaitu lewat Sosialisasi, lalu dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Ketua RT atau organisasi masyarakat seperti PKK, kelompok lansia maupun disabilitas. Kita datang bertatap muka melakukan sosialisasi menyampaikan informasi seputar Pilbup dan membuka sesi Tanya jawab agar apa yang belum dimengerti oleh masyarakat dapat ditanyakan ke kita langsung. Selain itu, ada juga percetakan dan pendistribusian bahan sosialisasi antara lain yaitu; spanduk, baliho, poster, umbul-umbul dll. Baliho dan umbul-umbul dipasang ditempat-tempat strategis agar dapat dilihat jelas oleh banyak orang, sehingga informasi tentang Pilbup 2020 dapat diketahui oleh masyarakat di wilayah kabupaten Semarang. Sebenarnya banyak sekali strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam mensosialisasikan Pilbup 2020.Ada lagi, kita juga mengadakan event-event menarik seperti konser musik dan kegiatan kesenian (Reog).Event seperti itu sangat diperlukan untuk menarik minat masyarakat untuk ikut pemilu. Namun, pemilu tahun 2020 ini jauh berbeda dikarenakan Pandemi Covid-19 event-event yang seperti itu ditiadakan karna adanya larangan pengumpulan massa atau bergerombol. Sosialisasi yang dilakukan hanya didalam

ruangan saja dan tidak boleh lebih dari 50 orang dan tentunya dihimbau semua yang datang mematuhi Protokol kesehatan sesuai aturan dan anjuran dari Pemerintah.

2. Bagaimana cara Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang menangani aduan atau kritik tentang kinerja selama mempersiapkan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020?

“Tentunya kita mendengarkan keluhan dari masyarakat. Kita ajak ngobrol, kita tampung juga saran-saran yang mereka berikan kepada kita. Ketika ada kesalahan persepsi mereka kepada KPU Kabupaten Semarang. Justru disitu kita dapat meluruskan dan memberikan pengertian”

3. Bagaimana cara dari Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam menganalisis perencanaan kampanye yang dilakukan?

“Sebelumnya pasti kita akan bahas perencanaan-perencanaan seperti itu pada rapat koordinasi. Kira-kira kampanye seperti apa yang akan dilakukan, hal apa yang dapat menarik minat masyarakat. Biasanya yang muncul adalah ide event kita kampanye lewat event-event menarik itu termasuk strategi perencanaan kampanye”

4. Apakah dalam melakukan kampanye, Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang menerapkan rancangan strategi kampanye?

“Tentu saja. Dalam segala kegiatan apalagi kampanye. Pasti ada strategi yang disusun agar acara berjalan sesuai tujuan dan harapan dari KPU Kabupaten Semarang”

5. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh Humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam menangani krisis?

“Dilihat dulu bagaimana krisisnya. Jika berkaitan dengan tuntutan hukum itu akan ditangani oleh Kasubag Hukum dari instansi KPU yang akan bekerjasama dengan humas dalam menangani krisis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mempelajari kasus lalu menentukan langkah yang akan diambil dengan cara rapat dengan seluruh anggota KPU Kabupaten Semarang”

6. Bagaimana bentuk back-up management yang dilakukan oleh KPU ketika menangani krisis?

“Ketika kita sudah tau krisis nya apa. Kita pelajari dahulu, setelah itu kita lakukan perencanaan untuk menangani krisis dengan tepat. Biasanya kita selalu meminta pendapat atau saran dari KPU Provinsi/KPU Pusat ketika melakukan konsultasi masalah-masalah yang terjadi di KPU Daerah”

7. Apakah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang memerlukan pihak ke-3 dalam menyelesaikan sebuah krisis yang dihadapi? (Pihak ke-3 bisa perorangan dari luar instansi ataupun organisasi yang dianggap bisa memberikan opini)

“ Dalam menangani krisis KPU Kabupaten Semarang tetap membutuhkan pihak ke-3 apabila krisis tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri. Jika krisis tidak dapat ditangani oleh KPU daerah maka kita akan mengkonsultasikannya kepada KPU Provinsi, jika memang tidak mendapatkan jalan keluar maka kita akan langsung naik untuk mengkonsultasikannya kepada KPU Pusat/RI”

8. Apa saja bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang?

“Biasanya melalui *Event* seperti konser music atau kesenian (Reog). Tapi, di Tahun ini kampanye bukannya ditiadakan tapi lebih tepatnya diganti dengan Debat umum/debat terbuka. Dikarenakan pandemi Covid-19 dari KPU RI menghimbau untuk tidak menimbulkan kerumunan. Jadi debat terbuka tersebut dapat diakses *Live* melalui siaran Youtube atau WEB resmi dari KPU Kabupaten Semarang”

9. Media apa saja yang digunakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam menyebarluaskan informasi dalam upaya mensosialisasikan Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020?

“ Ya itu tadi. Ada media cetak dan media social. Media cetak menggunakan leaflet, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul. Dan ada juga media social yang digunakan untuk sosialisasi secara online yaitu melalui facebook, twitter, web, dan instagram resmi dari KPU. Informasi-informasi lainnya juga dapat diakses pada WEB resmi KPU Kabupaten Semarang, adalagi yang baru yaitu membuat meme (lucu) tentang informasi Pilbup yang disebarkan melalui status WA itu merupakan inovasi baru dari KPU Kabupaten Semarang dalam upaya mensosialisasikan pemilihan Bupati Tahun 2020”

10. Selain social media, media apa yang digunakan untuk mensosialisasikan pemilihan bupati kabupaten semarang tahun 2020?

“Tentunya yang paling umum dilakukan yaitu Media Cetak karena mudah dan semua orang dapat membacanya, kalau social media banyak juga yang tidak dapat mengakses contohnya orang yang tidak melek teknologi ataupun lansia”

11. Apa alasan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang memilih media tersebut, untuk mensosialisasikan adanya pemilihan bupati?

“ Mudah diakses. Semua orang bisa lihat kalau kita pakai media cetak.Ya sangatlah umum sekali itu media cetak. Bahkan dijalan jalan dapat dilihat poster/baliho yang ada”

12. Bagaimana caraKPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang dalam mengurangi tingkat golput pada pemilihan bupati tahun 2020?

“Dengan cara gencar Sosialisasi. Dan selalu mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak suara/hak pilihnya dengan bijak.Karena 1 suara sangat berarti untuk kesejahteraan Kabupaten Semarang 5 tahun kedepan.Bahkan kita selalu membuat poster

tentang Jangan Golput dengan desain desain baru dan menarik. Hal itu dilakukan ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, bahkan kita ajarkan pengetahuan itu sejak dini dengan menyasar siswa SD, SMP, SMA. Kita beri tahu dasar-dasar pemilu dan kita beri materi apa itu Golput pada sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Semarang”

13. Bagaimana cara humas KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang mengukur tingkat keberhasilan dari program-program yang telah dijalankan untuk mensukseskan pemilihan bupati kabupaten semarang tahun 2020?

“Tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan atau program-program dari KPU dapat dilihat pada akhir Pemilu. Tolak ukurnya yang pasti ada pada Partisipasi Pemilih yang hadir tahun ini, nanti kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kita lihat juga kredibilitas dari wilayah-wilayah yang tidak menimbulkan konflik”

14. Bagaimana strategi Humas dalam menangani apabila ditemukan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2020?

“Nah ini, Perlu untuk diketahui bahwa yang menentukan ada atau tidaknya kecurangan itu adalah tugas dan wewenang dari BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu). Jadi, KPU hanya menyelenggarakan dan mempersiapkan Pemilu sedangkan Bawaslu ikut mendampingi KPU dan mereka yang menilai ada atau tidaknya indikasi kecurangan pada pemilihan bupati”

15. Bagaimana solusi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang selaku penyelenggara pemilihan. Jika terbukti ada kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati?

“Untuk solusi, ya tentunya Bawaslu yang nanti menilai dan hasilnya baru dikoordinasikan kepada KPU. Jika memang ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon bupati maka KPU akan menyampaikannya pada pihak terkait/pasangan calon bupati tersebut. Jika masih melanggar maka ada sanksi sanksi yang harus diterima”

Siti Solichah – Anggota Komisioner KPU Kabupaten Semarang Divisi SDM, Parmas, dan Kampanye

1. Bagaimana Rancangan Strategi Kampanye dari KPU Kabupaten Semarang?

Karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah Lembaga penyelenggara kegiatan pemilu sekaligus instansi pemerintah yang sudah dibatasi oleh peraturan yang sudah ada. Rancangannya kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh KPU Pusat.

Rancangan yang dilakukan itu seperti memfasilitasi kegiatan kampanye sesuai dengan regulasi yang ada seperti; Pemasangan alat peraga kampanye, penertiban kampanye, pemasangan iklan di media, dan mengatur jadwal kampanye paslon (pasangan calon) seperti pertemuan tatap muka dan debat publik.

2. Apa saja bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang?

Ya biasanya yang paling awal adalah pemasangan alat peraga kampanye. Seperti; Spanduk, poster, baliho, brosur, pamflet, dan umbul-umbul yang dipasang di tempat-tempat strategis di Kabupaten Semarang atau di jalan protokol.

Arif Suryawan – Masyarakat Sekitar Kabupaten Semarang

1. Sejauh mana anda mengetahui tentang kegiatan yang diadakan oleh KPU Kabupaten Semarang?

“ Kalau tentang teknis nya sedikit banyak saya tau. Rangkaian kegiatan yang di adakan oleh KPU saya tau, mulai dari pembentukan panitia seperti PPK & PPS. Terus kegiatan-kegiatan seperti event saya juga saya tau informasinya dan saya juga ikut mensosialisasikannya pada masyarakat lainnya yang mungkin belum tau. Kalau dari KPU nya sendiri sudah gencar melakukan kegiatan agar Pilbup nya sukses dan banyak yang nyoblos “

2. Apakah informasi yang disampaikan oleh KPU kabupaten Semarang mudah dipahami?

“ Mudah dipahami. Karena informasi yang disebarkan oleh KPU kan menyeluruh ya. Dijalan jalan pun juga ada itu termasuk sosialisasinya pihak KPU. Kalau menurut saya niat KPU untuk mensosialisasikan tersampaikan pada masyarakat. Informasinya ada dimana mana kok, ada di baliho dan leaflet juga ada “

DOKUMENTASI



**KUNJUNGAN SISWA MTS MA'ARIF BELAJAR WAWASAN PEMILU
UNGARAN, 16 DESEMBER 2019
DI GEDONG PINTAR PEMILU, KANTOR KPU KABUPATEN SEMARANG**



**SOSIALISASI PEMBENTUKAN PPK PILBUP SEMARANG 2020
UNGARAN, 21 JANUARI 2020
DI AULA LANTAI 3 GEDUNG KPU KABUPATEN SEMARANG**



GELAR KEGIATAN PUBLIC HEARING

BANDUNGAN, 21 FEBRUARI 2020

DI GRIYA PERSADA CONVENTION HOTEL & RESORT BANDUNGAN



PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI & PELANTIKAN PPK TERPILIH PILBUP 2020

UNGARAN, 1 MARET 2020

DI THE WUJIL RESORT & CONVENTIONS



**KPU BUKA HELP DESK DI 4 KECAMATAN
UNTUK MEMPERMUDAH AKSES CALON PENDAFTAR SELEKSI PPS
UNGARAN, 18 FEBRUARI 2020**



**ADAKAN MEDIA GATHERING
UNGARAN, 16 MARET 2020
DI AULA LANTAI 3 GEDUNG KPU KABUPATEN SEMARANG**



AUDIENSI DENGAN GEMPUR (GERAKAN MASYARAKAT PEKERJA UNGARAN)
UNGARAN, 12 AGUSTUS 2020
DI AULA LANTAI 3 GEDUNG KPU KABUPATEN SEMARANG



SOSIALISASI DALAM BENTUK EVENT
NGOPI: NGOBROLIN PEMILU
UNGARAN, 25 AGUSTUS 2020
DI HALAMAN KANTOR KPU KABUPATEN SEMARANG



PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI KABUPATEN SEMARANG 2020

UNGARAN, 4 SEPTEMBER 2020

DI KANTOR KPU KABUPATEN SEMARANG



RAPAT KERJA KAMPANYE PILBUP KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

UNGARAN, 9 SEPTEMBER 2020

DI AULA LANTAI 3 GEDUNG KPU KABUPATEN SEMARANG



**UJI PUBLIK DPS (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA) DENGAN MENJALANKAN
PROTOKOL KESEHATAN**

UNGARAN BARAT, 26 SEPTEMBER 2020, DI DESA GOGIK



SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

UNGARAN, 8 OKTOBER 2020

DI THE WUJIL RESORTS & CONVENTIONS